

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA  
PEKANBARU MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2019**

**Oleh: Yudi Kurniawan**

**Pembimbing : Wazni, S.IP, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintah – Prodi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293 Telp/Fax. 0761 - 63277

***ABSTRACT***

*Persons with disabilities constitutionally have the same rights and positions as other citizens before the law and government. So that the empowerment of persons with disabilities aims to develop the potential that exists within persons with disabilities so that they are able to work even though they have some limitations. The writing of this thesis is motivated by the researcher's view of the phenomenon that occurs the lack of participation of persons with disabilities in sewing training held by the Pekanbaru City government so that several problems emerged that were found by the authors related to the empowerment of the potential of persons with disabilities in the city of Pekanbaru.*

*The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in Pekanbaru City. With the type and source of research data, it is divided into primary data in the form of purposive informant collection techniques and secondary data in the form of supporting data related to persons with disabilities. Data collection techniques using interviews, documentation and document tracing. while data analysis was carried out using qualitative analysis.*

*The results of this study are firstly that the empowerment of people with disabilities by the Pekanbaru City Social Service has not run optimally so that people with disabilities are not empowered, it can be seen from (1) human development is carried out by training and socialization but many people with disabilities do not participate, (2) business development is carried out with a bazaar and facilities for persons with disabilities to develop their businesses, (3) community development is realized with motivation from the immediate family environment (4) institutional development is the role of workshop development institutions to provide a forum for channeling talents possessed by people with disabilities. The two factors that support the empowerment of disability by the Pekanbaru City Office are (a) central and local government support (b) environmental support (c) organizational support (d) facilities and infrastructure. While the inhibiting factor is the lack of government role and support from the general public*

*Keywords: Empowerment, Disability, Social Service*

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan diringkas menjadi dua macam fungsi, yaitu: *pertama*, Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa public yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, Pemerintah mempunyai fungsi skunder pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kaum disabilitas mengalami berbagai masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar bahkan dimulai dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 D ayat (2) telah mengatur, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, setiap orang tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, sampai instansi pemerintah.

---

<sup>1</sup> Suprianto, "Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik," *Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2 (2014).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas maupun Anak Dalam Kedisabilitas (ADK).

Berdasarkan rekap data Dinas Sosial di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019, ada sekitar 73% dari jumlah kaum difabel sebanyak 456 orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Sementara yang telah bekerja dan diterima oleh lingkungan pekerjaan hanya 27% yaitu sekitar 124 orang saja dari jumlah yang ada. Hal ini akan menyebabkan semakin rendah pula kualitas ekonomi yang dimiliki penyandang disabilitas di kota pekanbaru. Penanganan terhadap penyandang disabilitas juga harus tepat dimana tepat dalam artian pemerintah harus memberi perlakuan ataupun pelatihan dengan kedisabilitas yang mereka alami.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat 1 mensyaratkan pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Lalu pasal 2 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1% penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk meningkatkan lagi jumlah kaum difabel agar dapat di terima dalam dunia pekerjaan, dibutuhkan lagi kebijakan yang lebih serius lagi dari pemerintah kota pekanbaru.

Pemerintah provinsi riau melakukan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yang di pertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun

2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan sosial, dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen.<sup>2</sup>

Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat (baik dalam bahasa Indonesia atau pun Inggris) selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negatif. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna

daksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ada kata *disability* yang artinya ketidakmampuan, *invalid* yang berarti tidak lengkap.<sup>3</sup>

Dalam hal ini untuk berinteraksi dengan difabel yang menderita tuna rungu dan tuna wicara kita sebagai masyarakat normal hendaklah menggunakan bahasa isyarat karena hanya bahasa isyaratlah yang dimengerti oleh penderita difabel ini. Jika kita menggunakan bahasa normal selayaknya orang normal pada umumnya maka mereka tidak akan mengerti. Undang-Undang tentang disabilitas telah menjelaskan secara jelas istilah disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-Undang yang dulunya adalah penyandang cacat kini diganti menjadi penyandang disabilitas. Istilah yang digunakan oleh akademisi maupun masyarakat sebagai alternatif untuk istilah cacat. Diantaranya adalah disabilitas, berkebutuhan khusus, spesial, dan difabel.<sup>4</sup> Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik,

<sup>2</sup> Moh Nashir Hasan, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 24.

<sup>3</sup> Hasan, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang."

<sup>4</sup> Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks, 2016), 2.

disabilitas mental/intelegensi, dan disabilitas ganda. Secara lebih detail, pengklasifikasikan penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Ragam penyandang disabilitas<sup>5</sup>**

No	Nama	Jenis	Pengertian
1	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	tidak dapat melihat ; buta
2	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	tidak dapat mendengar ; tuli
3	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	tidak dapat berbicara ; bisu
4	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	cacat tubuh
5	Tuna Laras	- Disabilitas Fisik - Disabilitas Mental	-cacat suara dan nada -sukar mengendalikan emosi dan sosial
6	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	cacat pikiran; idiot lemah daya tangkap ; idiot
7	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui klasifikasi dari berbagai macam penyandang disabilitas, maka setelah kita mengetahui klasifikasinya kita dapat memberikan prilku khusus terhadap mereka sesuai dengan kedisabilitasannya yang mereka

derita Pemberdayaan bagi kelompok penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Tujuan ini pada dasarnya hendak menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu memecahkan problem ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu-individu dalam masyarakat secara umum. Ketika para penyandang disabilitas tidak bergantung terhadap pihak lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif menjadi semakin terbuka. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai aktifitas produktif akan secara langsung mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah. Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan tidaklah mudah, apalagi jika berkaitan dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

teori pemberdayaan masyarakat yang telah di paparkan oleh Mardikanto bahwa

<sup>5</sup> Hasan, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPD Kota Semarang."

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan empat bina, yaitu :

1. Bina Manusia
2. Bina Usaha
3. Bina Lingkungan
4. Bina Kelembagaan
- 5.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini di ajukan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
- 3.

### TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang di ungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>6</sup> Creswell (1998) juga menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 124.

kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>7</sup> Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasiakan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>8</sup>

### KERANGKA TEORITIK

#### a). Pemberdayaan Masyarakat

Djohani (2003) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Rappaport (1984) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas, diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 33.

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 26.

<sup>9</sup> Dr. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2019), 49.

ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mardikanto menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan yang namanya empat bina, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Bina Manusia

Bina manusia dalam pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat dikatakan berhasil apabila para penyandang disabilitas tersebut memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai macam keterampilan yang telah dilakukan pembinaan sebelumnya

#### 2. Bina Usaha

Bina usaha adalah upaya peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Bina usaha juga merupakan peningkatan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan pengusaha teknologi, meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi, modal, pasar, serta membangun kemitraan usaha. Bina usaha ini dasarnya berorientasi ada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia.<sup>11</sup>

#### 3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan ialah upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan, membangun infrastruktur terutama menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi, rehabilitasi, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

#### 4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat di wadah dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa unsur penting dalam kelembagaan adalah institusi yang merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat

### HASIL PENELITIAN

Pembahasan penelitian ini mengenai bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dikaji melalui teori menurut Mardikanto bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan empat bina, yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan

#### 1. Bina Manusia

---

<sup>10</sup> Totok Mardikanto and Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 113.

<sup>11</sup> Firna Dianti and Nahar Effendi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tajung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis,"

---

*Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 319–332.

<sup>12</sup> Dianti and Effendi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tajung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis."

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kapasitas para penyandang disabilitas melalui bina manusia dilakukan dengan sosialisasi serta melakukan pelatihan dalam peningkatan skil individu para penyandang disabilitas melalui program pelatihan menjahit. Dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini juga dilakukan pelatihan-pelatihan. Berikut jenis program pemberdayaan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru:

	ekonomi difabel itu sendiri
--	-----------------------------

Dari tabel diatas dapat kita lihat berbagai macam jenis program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2019. Pemberdayaan ini dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Tujuan dari bina manusia ini merupakan pemberdayaan pelatihan keterampilan yang membuat penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, bakat, dan minat mereka dapat tersalurkan serta dapat menciptakan jiwa mereka yang kreatif, karena keterampilan merupakan berbagai kemampuan untuk beradaptasi berperilaku positif seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif.<sup>13</sup>

### 2. Bina Usaha

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengupayakan pembina usaha dengan semaksimal mungkin hal ini di tunjukan dengan memberikan dan memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan yang telah mereka dapat dalam pelatihan yang di adakan sehingga penyandang disabilitas dapat berkembang dan dapat mendirikan usaha yang bisa sedikit menopang perekonomian penyandang disabilitas.

### 3. Bina Lingkungan

**Tabel 3. 1 Data Jenis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Tahun 2019**

Jenis Pemberdayaan Disabilitas	Tujuan Pemberdayaan
- Pelatihan Menjahit	- tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas
- Pelatihan Membuat Anyaman Dari Kertas	- agar disabilitas bisa berkarya layaknya manusia normal pada umumnya sehingga dapat meningkatkan
- Pelatihan Membuat Sarung Bantal	- agar disabilitas bisa berkarya layaknya manusia normal pada umumnya sehingga dapat meningkatkan

<sup>13</sup> Septi Prahasti, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kerajinan Batik Tulis Khas Lampung Dikemiling Bandar Lampung" (Uin Raden Intan Lampung, 2020), 35.

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak. Pemberdayaan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.<sup>14</sup> Bina lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan menentukan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku).<sup>15</sup>

dalam bina lingkungan beberapa pihak harus ikut serta dalam proses pembinaan penyandang disabilitas tidak hanya peran pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetapi juga dari kebudayaan keluarga dan teman para penyandang disabilitas. Keberhasilan bina lingkungan pada pemberdayaan penyandang disabilitas dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan non-fisik atau lingkungan sosial yang ada di wilayah bersangkutan.

#### 4. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan mensyaratkan tersediannya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif, artinya bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah

berfungsi secara efektif. Di Pekanbaru sendiri Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki lembaga bina loka karya dimana kelembagaan ini bergerak dalam pemberdayaan disabilitas, dengan adanya bina loka karya ini memang terasa manfaatnya bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemampuan mereka karena disana mereka dibimbing dan mendapatkan fasilitas yang memadai dalam mengembangkan bakat yang mereka punya.

### **Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

Setelah melakukan penelitian ini tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan yang akan di jelaskan berikut ini :

#### 1. faktor pendukung

##### a). Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Seperti yang kita ketahui dimana pemerintah kota pekanbaru telah melaksanakan isi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada di kota pekanbaru dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas sosial kota pekanbaru

##### b). Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu yang sangat mempengaruhi seseorang itu tinggal atau berada. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang nyaman maka ia akan merasa betah. Lingkungan loka bina karya tempat dimana dinas sosial kota pekanbaru melakukan pelatihan sejauh ini cukup mendukung sebab semua warga binaan yang

<sup>14</sup> Muh Zulkarnain, "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa". Vol. 11, no. 2 (2018): 104.

<sup>15</sup> Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*.

berada di loka bina karya mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan, sehingga memberikan motivasi kepada warga binaan yang lainnya

c). Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang cukup memadai seperti peralatan dan perlengkapan dalam pemberdayaan contohnya saja dalam pelatihan menjahit maka dinas sosial kota pekanbaru telah memenuhi peralatan dan perlengkapan menjahit yaitu mesin jahit khusus penyandang disabilitas, gunting, jarum, benang, bahan, ruangan menjahit untuk terlaksananya keterampilan menjahit. Dalam hal ini dinas sosial telah menyediakan beberapa keperluan untuk menopang agar terlaksananya pemberdayaan ini dengan baik, dapat kita lihat sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Daftar Pengadaan  
Perlengkapan Dalam Pemberdayaan  
Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru  
Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun  
2019**

N o	Nama Barang	Mer k	Harg a	Ban yak Bar ang	Sat uan	Juml ah Harg a
1	Mesin Jahit	Butt erfly	1.500 .000	4	Uni t	6.00 0.00 0
2	Mesin Obras	Zuki	3.500 .000	2	Uni t	7.00 0.00 0
3	Mesin Neci	-	5.000 .000	1	Uni t	5.00 0.00 0
4	Mesin Lubang Kancin g	-	5.000 .000	1	Uni t	5.00 0.00 0
5	Mesin Potong Kain	-	5.000 .000	1	Uni t	5.00 0.00 0
6	Aksesori	-	7.000	1	Uni	7.00

ris dan Perleng kapan		.000		t	0.00 0
<b>Total</b>					35.0 00.0 00

Sumber: renja apbd dinas sosial kota pekanbaru tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pemerintah kota pekanbaru benar-benar sangat mendukung terlaksananya pemberdayaan ini sehingga mereka memenuhi segala sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

2. faktor pendukung

a). Belum maksimalnya peran dari pemerintah

Peran pemerintah daerah sangat sentral dilihat dari sisi aksesibilitas fisik maupun non fisik penyandang cacat. Kondisi riil penyandang cacat selama ini dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan umumnya masih meragukan kemampuan para difabel dalam berbagai aktivitas kehidupan. Disinilah di perlukannya memaksimalkan peran pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dikota pekanbaru, namun peran dari pemerintah kota pekanbaru belum terlalu maksimal dalam meningkatkan perekonomian para penyandang difabel.

b). Kurangnya dukungan dari masyarakat

Kurangnya dukungan masyarakat terhadap penyandang disabilitas Kota Pekanbaru membuat para penyandang disabilitas merasa minder karena keberadaan mereka tidak terlalu di perhitungkan oleh masyarakat normal sehingga disabilitas ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan meskipun kemampuannya telah diasah pada

pelatihan ataupun pemberdayaan yang diadakan oleh dinas sosial kota pekanbaru. Kurangnya dukungan masyarakat kota pekanbaru dapat dilihat dari kurangnya menghargai ataupun mengapresiasi hasil karya dari penyandang disabilitas kota pekanbaru.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan dan pada bab sebelumnya, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan dari penelitian yang peneliti telah rangkum :

### a. Bina Manusia

Pemberdayaan disabilitas melalui bina manusia telah dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru melalui dinas sosial kota pekanbaru dengan cara sosialisasi serta melakukan pelatihan dalam meningkatkan skil individu para penyandang disabilitas melalui program pelatihan menjahit, serta pelatihan membuat kerajinan tangan. Namun hal ini belum berjalan dengan cukup baik karena masih banyak penyandang disabilitas yang enggan untuk mengikuti program pemberdayaan ini hal ini didasari masih kurangnya tingkat percaya diri para difabel.

### b. Bina Usaha

Pemberdayaan melalui bina usaha bisa terbilang berjalan cukup baik karena dinas sosial kota pekanbaru telah menyediakan bazar dan memfasilitasi difabel untuk mengembangkan karya yang telah mereka buat, namun sayangnya bazar ini hanya diadakan pada saat event peringatan hari disabilitas dunia.

### c. Bina Lingkungan

Pemberdayaan melalui bina lingkungan berjalan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya motivasi dari lingkungan sekitar terutama keluarga agar penyandang

disabilitas mengikuti berbagai program yang di buat oleh dinas sosial kota pekanbaru

### d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan melalui bina kelembagaan berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga bina loka karya yang membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan skil individu yang mereka miliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hasan, Moh Nashir. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang." *Skripsi*. Universitas Islam Negri Walisongo, 2018.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Prahasti, Septi. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kerajinan Batik Tulis Khas Lampung Dikemiling Bandar Lampung." Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Suprianto. "Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik." *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014).
- Zulkarnain, Muh. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa" 11, no. 2 (2018):

**Aritikel Ilmiah**

- Aesah, Siti, Yhonanda Harsono, and Derzika Inva Jaswita. "Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Manajemen*, Vol.14, No. 2 (2020).
- Arianti, Tri Puji. "Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas Di." *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (2018).
- Dianti, Firna, and Nahar Effendi. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tajung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 3 (2019).
- Jarmitia, Sri -, Arum - Sulistiyani, Nucke - Yulandari, Farhati M Tattar, and Harri - Santoso. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Pada Penyandang Disabilitas Fisik Di Slb Kota Banda Aceh." *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Krisnada, Krisnada, and Sugeng Widodo. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- Saputri, Anisza Eva, Santoso Tri Raharjo, and Nurliana Cipta Apsari. "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang Dengan Disabilitas Sensorik." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2019).
- Suprianto. "Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik." Vol. 1, No. 2 (2014)
- Theresia Baturangka, J.E Kaawoan, Frans Singkoh. "Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas." *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3, No. 3 (2019).
- Zulkarnain, Muh. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa", Vol. 11, No. 2 (2018).
- "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur." *Nuansa*, Vol. 15, No. 2 (2018).